

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pariwisata Indonesia berkembang sangat pesat dari tahun ke tahun. Tercatat bahwa Indonesia pada tahun 2018 tercatat menduduki peringkat ke - 9 di dunia dalam bidang pariwisata versi *The World Travel & Tourism Council* (WTTC). Hal itu terlihat dari pertumbuhan bidang pariwisata yang mencapai 22%. Pertumbuhan ini terpaut cukup banyak jika dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata dunia yang berada diangka 6%. Hal itu jelas menjadikan Indonesia menduduki peringkat ke - 9 dunia dengan tingginya peningkatan yang terjadi (*Tempo*, 2018).

Seiring dengan peningkatan yang telah disebutkan di atas, tentu sumbangan pendapatan dari bidang pariwisata cukup besar untuk pemerintah Indonesia. Media tersebut juga memaparkan pada tahun 2019, devisa yang didapat mencapai 17 miliar dolar AS. Sebagai wujud optimis dari pemerintah pada 2020, akan dinaikkan target pendapatan devisa dari bidang pariwisata. Target pada 2020 tercatat sebesar 20 miliar dolar AS. Jumlah itu tentu sangat besar. Maka, untuk mencapai target tersebut diperlukan beberapa strategi agar pemerintah dapat mencapai target pendapatan devisa pada bidang pariwisata ini.

Strategi untuk mewujudkan peningkatan destinasi pariwisata adalah dengan meningkatkan kualitas lokasi wisata agar layak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara seperti di Bali. Hal ini disebut juga dengan 10 'Bali Baru'. Wacana ini mulai diutarakan oleh Arief Yahya sebagai Menteri Pariwisata pada era kepemimpinan Presiden Jokowi. Hadirnya 10 'Bali Baru' diutarakan saat momentum peluncuran Badan Otorita Pariwisata Borobudur (BOB) (*Kompas*, 2018).

Saat peluncuran BOB, Menteri Pariwisata mengutarakan mengenai 10 'Bali Baru' karena Borobudur masuk sebagai salah satu kriteria untuk kesuksesan program itu. Selain Borobudur, yang masuk sebagai 10 'Bali

Baru' yaitu Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Pulau Seribu, Mandalika, Gunung Bromo, Wakatobi, Labuan Bajo, Morotai (CNN, Indonesia Pamer '10 Bali Baru' di Pertemuan IMF-Bank Dunia, 2018).

BOB ini memiliki fungsi untuk menjadikan Borobudur sebagai salah satu destinasi wisata nasional dan internasional yang memiliki kekayaan potensi wisata budaya berkelanjutan. BOB dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017. BOB disebut sebagai satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pariwisata Nomor 10 tahun 2017.

BOB yang saat ini hadir diharapkan akan mampu mendatangkan 2 juta wisatawan mancanegara (wisman) khususnya di tahun 2019. Pada akhirnya Borobudur ini akan dikembangkan sebagai destinasi wisata dengan daya tarik berbasis *heritage* yang diakui UNESCO. Ada beberapa elemen yang harus ada untuk mendukung target dan cita-cita tersebut.

Menteri Pariwisata mengatakan bahwa BOB mengembangkan Borobudur dengan mengambil fokus pada 3A, yaitu atraksi, aksesibilitas dan amenitas. Arief menambahkan, tugas BOB Borobudur meliputi koordinasi dan sinkronisasi. Selain itu BOB juga memfasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di kawasan Pariwisata Borobudur. Hal itu langsung dikatakan saat meresmikan BOB (CNN, Menpar Resmikan Badan Otoritas Pariwisata Borobudur, 2017).

Oka A. Yoeti (1997:165) berpendapat bahwa berhasilnya suatu pengelolaan objek wisata hingga tercapainya kawasan wisata sangat tergantung pada 3A yaitu, atraksi (*attraction*), mudah dicapai (*accessibility*), dan fasilitas (*amenities*). Atraksi wisata diartikan sebagai segala sesuatu yang terdapat di daerah wisata yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah. Sesuatu yang dapat menarik wisatawan meliputi benda-benda tersedia di alam, hasil ciptaan manusia (kebudayaan), dan tata cara hidup dalam masyarakat. Aksesibilitas dalam pariwisata berkenaan dengan tingkat kemudahan seorang wisatawan mencapai suatu tempat obyek wisata. Beberapa hal yang mempengaruhi aksesibilitas suatu tempat adalah kondisi

jalan, tarif angkutan, jenis kendaraan, jaringan transportasi, jarak tempuh, dan waktu tempuh. Fasilitas wisata dapat diartikan suatu sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh pengelola wisata untuk kebutuhan wisatawan. Kebutuhan wisatawan tidak hanya menikmati obyek wisata saja namun wisatawan juga memerlukan sarana dan prasarana wisata seperti akomodasi (sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, komunikasi, tempat hiburan, hotel/penginapan, restoran, dan toko cinderamata), transportasi, dan lain-lain meliputi tempat ibadah dan MCK.

Elemen 3A, khususnya pada poin aksesibilitas, sudah mulai dilaksanakan. Pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) adalah jawaban terhadap hal tersebut. Selain itu juga dengan pembangunan NYIA bukan hanya akan berdampak pada perkembangan 10 destinasi utama, khususnya Borobudur, namun juga berdampak pada aksesibilitas jalur Jogja, Solo, Semarang (Joglosemar).

Kehadiran NYIA sangat diyakini dapat meningkatkan bukan hanya kunjungan wisata ke Borobudur tetapi juga aksesibilitas Joglosemar. Selain itu kehadiran NYIA diharapkan akan menjadi faktor penunjang BOB untuk mencapai target kunjungan 2 juta wisman. Target tersebut terdiri dari 75% wisman yang masuk ke Indonesia melalui udara, dan 24% sisanya dari penyeberangan. Penyeberangan terbesar bagi wisman dari Singapura ada di Kepulauan Riau. Jika Kepulauan Riau dengan akses lautnya tidak dihitung, maka seutuhnya wisman masuk ke Indonesia melalui jalur udara (CNN, Menpar Resmikan Badan Otorita Pariwisata Borobudur, 2017). Itu alasan yang memperkuat mengapa NYIA sangat dibutuhkan dan diharapkan akan berdampak besar terhadap program wisata yang sudah dipersiapkan, seperti paparan liputan media di atas.

Penulis tertarik dengan Program 10 'Bali Baru', terutama Borobudur, untuk diangkat sebagai topik pada tugas akhir. Ketertarikan penulis terkait dengan perkembangan BOB yang masih cukup baru. Penulis ingin menggali lebih dalam bagaimana Borobudur dipersiapkan untuk menyongsong 10 'Bali Baru' dengan berbagai persiapan. Untuk itulah BOB dibentuk, target kunjungan wisata ditingkatkan, dan keduanya ditunjang dengan peningkatan

aksesibilitas, yaitu pembangunan NYIA yang membutuhkan biaya cukup besar. Demi ketersediaan variasi akses ke Borobudur, akses lain pun dipersiapkan, yaitu Joglosemar.

Ketertarikan penulis mengangkat topik mengenai Borobudur bukan hanya dipicu oleh 10 'Bali Baru' tetapi juga mengenai perkembangan Borobudur menjadi destinasi wisata utama Indonesia. Hal itu dilatarbelakangi oleh pengalaman penulis sebelumnya, yaitu penulis pernah melaksanakan program *internship* di PT. TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN dan RATUBOKO (PERSERO)(PT. TWC), khususnya pada tim kerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Ketika melaksanakan program *internship* di PKBL PT. TWC, penulis sudah mendapatkan beberapa gambaran kerja mengenai Candi Borobudur, Prambanan dan Ratuboko. Namun kemudian ketika ada informasi dipersiapkannya Borobudur menjadi destinasi wisata utama Indonesia maka penulis menjadi semakin tertarik untuk meneliti dan menulis hal tersebut.

Bentuk nyata kinerja PT. TWC, khususnya Tim Kerja PKBL, dalam menyongsong Borobudur sebagai tujuan wisata utama adalah menghadirkan Balai Perekonomian Desa (Balkondes) di Dusun Ngaran, Kecamatan Borobudur. Tujuan Tim Kerja PKBL PT. TWC menghadirkan Balkondes, salah satunya, adalah untuk memecah konsentrasi massa ketika peningkatan kunjungan wisatawan ke Candi Borobudur terjadi.

Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Candi Borobudur jika tidak dipersiapkan dan diantisipasi akan menjadi permasalahan. Pembangunan Balkondes dipersiapkan untuk memecah fokus wisatawan agar tidak menumpuk pada satu titik saja, yaitu Candi Borobudur. Balkondes dibangun sebagai jawaban terhadap penumpukan massa wisatawan. Namun, Hal ini bukanlah satu-satunya alasan, karena ada hal lain yang juga melatarbelakangi pembangunan Balkondes Ngaran.

Selain untuk memecah konsentrasi wisatawan yang banyak ke Candi Borobudur, Balkondes diharapkan hadir untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar Borobudur. Guna meningkatkan perekonomian

masyarakat maka pelaksanaan Balkondes melibatkan partisipasi komunitas di Dusun Ngaran.

Cara untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan hadirnya Balkondes adalah mengikutsertakan warga sekitar sebagai pelaksana jalannya Balkondes. Selain itu, masyarakat dapat membawa aneka hasil kerajinan yang telah mereka buat untuk dijual di Balkondes sehingga dapat mempermudah penjualan barang hasil kerajinan mereka atau titipan warga sekitar.

Penulis juga memiliki akses informasi kepada komunitas di Dusun Ngaran yang diharapkan akan mempermudah proses pengumpulan data. Hal ini terjadi ketika sedang melakukan observasi di Balkondes penulis bertemu dengan seorang pengelola yang berasal dari Dusun Ngaran Borobudur, yaitu Pak Agus. Beliau mengatakan hal yang mengagetkan, yaitu bahwa Kecamatan Borobudur merupakan kecamatan miskin. Borobudur merupakan kecamatan yang menduduki peringkat ke 17 dari 21 kecamatan di Kabupaten Magelang.

Hal itu tentu sangat tidak masuk akal. Jika hal itu benar terjadi maka kehadiran Borobudur sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia kiranya tidak berdampak apapun bagi perekonomian masyarakat sekitar. Penulis merasa bahwa ada sesuatu yang salah jika Kecamatan Borobudur merupakan kecamatan miskin meskipun memiliki Candi Borobudur sebagai warisan budaya yang sudah diakui oleh UNESCO bahkan sekarang dijadikan wisata utama di Indonesia. Apa lagi hal itu saat ini juga sudah mulai ditunjang dengan kehadiran Balkondes.

Sebuah penelitian yang berjudul “Pengelolaan Balai Ekonomi Desa Dalam Mengembangkan Pariwisata Di Kawasan Candi Borobudur” memaparkan bahwa pengelola belum memaksimalkan potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi daya tarik wisata. Artinya, dalam hal ini hadirnya Balkondes juga belum berjalan dengan maksimal. Belum maksimalnya pengembangan potensi di Balkondes juga sejalan dengan belum maksimalnya proses manajemen yang dilakukan dalam mengelolanya. Apabila dimaksimalkan, tentu Balkondes bisa memberi dampak lebih besar

bagi masyarakat dan bagi kecamatan Borobudur (Dian Octavia Hapsari dan Sugi Rahayu, 2018).

Penelitian lain mengenai “Model CSR Pengembangan Pariwisata Berbasis Komunitas Binaan BUMN: Studi Kasus Balkondes Di Kawasan Borobudur Magelang Jawa Tengah” memaparkan bahwa model CSR yang dilaksanakan di lokasi tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh desa dan BUMN sponsor.

Model pariwisata berbasis komunitas binaan BUMN ini pada dasarnya mengandung unsur partisipasi, kolaborasi, redistribusi kekuasaan dan modal sosial di dalam prosesnya. Namun BUMN pendamping yaitu PT. TWC dalam pengelolaan Balkondes, desa dan perangkatnya masih belum bersinergi terutama pada tahap operasional.

Tahap operasional memiliki rangkaian yang cukup panjang. Balkondes Borobudur sudah melakukan pendampingan operasional, namun tidak melakukan pendampingan yang mulai merujuk pada pemasaran, pemetaan produk, segmentasi. Selain itu juga tidak adanya pelatihan bahasa Asing bagi komunitas Ngaran yang terlibat di dalamnya. Hal itu yang kemudian menjadikan CSR pengembangan pariwisata berbasis komunitas binaan BUMN tidak maksimal.

Meskipun demikian, kehadiran Balkondes sudah memberikan dampak ekonomi berupa lapangan pekerjaan bagi pemuda-pemudi desa, meningkatkan pendapatan ibu-ibu PKK, komunitas pedagang, komunitas Andong, RT dan dusun. Balkondes juga menyumbang deviden bagi PADes Borobudur Rp 32.000.000,00/ semester dipertengahan tahun 2017. Selain itu, dampak sosialnya adalah Balkondes memberikan ruang publik bagi masyarakat, meningkatkan modal sosial dan menumbuhkan rasa percaya diri masyarakat desa (Lestari, 2017).

Merujuk dari penelitian di atas, peneliti melihat jika proses dalam pengelolaan Balkondes ini diperbaiki tentu akan memberi dampak ekonomi dan sosial yang semakin besar. Terutama menyongsong 10 ‘Bali Baru’, rasanya Balkondes akan semakin besar. Namun untuk menjadikan Balkondes

semakin besar, tentu diperlukan partisipasi dari masyarakat yang terlibat, sinergi yang baik serta manajemen yang baik juga.

Informasi dari beberapa berita yang dikutip penulis mengenai perkembangan pariwisata di sekitar Borobudur, didukung oleh beberapa riset terdahulu yang pernah dilakukan di kawasan Borobudur khususnya Balkondes dan juga pengalaman penulis ketika melakukan program *internship* serta ditambah informasi ketika penulis melakukan observasi bertemu dengan pak Agus sebagai pengelola Balkondes, semakin memperkuat daya tarik penulis untuk melakukan penulisan dan penelitian dikawasan Borobudur khususnya Balkondes.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini bukan merupakan sesuatu yang baru, namun penulis mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda. Fokusnya akan dititikberatkan pada partisipasi komunitas Balkondes Ngaran. Penulis memiliki keyakinan Balkondes akan menjadi besar karena juga didukung oleh lokasi, serta program-program yang sedang dilaksanakan yaitu 10 'Bali Baru'. Maka, penelitian mengenai Balkondes ini menjadi sangat relevan dan layak untuk diteliti.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah wujud partisipasi komunitas Dusun Ngaran dalam Program BALKONDES Borobudur?
2. Mengapa komunitas Dusun Ngaran turut berpartisipasi dalam Program BALKONDES Borobudur?
3. Bagaimana proses partisipasi komunitas Dusun Ngaran dalam Program BALKONDES Borobudur?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui wujud partisipasi komunitas Dusun Ngaran dalam Program BALKONDES Borobudur.

2. Mengetahui alasan komunitas Dusun Ngaran turut berpartisipasi dalam Program BALKONDES Borobudur Mengetahui proses partisipasi komunitas di Dusun Ngaran dalam rangka mengembangkan Balkondes Borobudur.
3. Mengetahui proses partisipasi komunitas Dusun Ngaran dalam Program BALKONDES Borobudur.

1.4. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berdasarkan hasil penelitian peneliti lain yang berhasil penulis temukan berjumlah empat buah. Penulis akan meninjaunya untuk menempatkan posisi topik penelitian penulis dan menemukan konsep teoritik apa yang kiranya relevan untuk mendukung penyusunan kerangka berpikir di dalam proposal ini.

Pertama berdasarkan penelitian dari Dian Octavia Hapsari dan Sugi Rahayu, M.Pd., M.Si. Tahun 2018 dengan judul *Pengelolaan Balai Ekonomi Desa Dalam Mengembangkan Pariwisata Di Kawasan Candi Borobudur* dijelaskan mengenai pengelolaan yang ada di Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Borobudur dengan berfokus pada 3 indikator. Indikator tersebut meliputi atraksi, aksesibilitas dan fasilitas. Dari masing-masing indikator tersebut melibatkan komunitas di dalamnya.

Hasil dari penelitian tersebut disebutkan pada indikator atraksi, komunitas berperan menyediakan masakan tradisional khususnya ibu-ibu PKK di Dusun Ngaran. Selain itu juga pegawai yang terlibat di Balkondes berasal dari Dusun Ngaran. Hasilnya dari perjalanan Balkondes dua tahun, Balkondes memberikan dampak secara ekonomi bagi masyarakat sekitar. Selain itu, dalam penelitian ini disebutkan bahwa potensi yang ada di daerah tersebut dikembangkan dan dikemas melalui kerjasama pemerintah dan masyarakat didukung oleh swasta agar menjadi objek wisata yang dapat memiliki nilai tambah untuk masyarakat.

Indikator selanjutnya yaitu aksesibilitas. Dalam indikator ini disebutkan bahwa hadirnya Balkondes bertujuan untuk mengangkat desa-desa di sekitar kawasan Borobudur agar terangkat sehingga dapat dijadikan alternatif tujuan

wisata untuk wisatawan yang berkunjung ke Borobudur. Terkait dengan mudah aksesibilitas, hal ini mempengaruhi keramaian desa dan juga jalan-jalan desa. Kesempatan ini dimanfaatkan warga untuk berjualan. Hal ini mendatangkan pendapatan baru bagi warga. Disebutkan juga dalam penelitian ini jika beberapa warga juga mendapat lapangan kerja sebagai pengemudi kendaraan wisata.

Pada indikator terakhir dari penelitian ini mengenai fasilitas disebutkan bahwa fasilitas yang tersedia selain kedai kopi adalah *homestay*. Namun fokus pada keterlibatan warga dalam hal ini adalah ibu-ibu PKK diberikan pelatihan memasak sehingga kemudian dapat menyajikan hidangan makan di *homestay*, dan juga dapat memberikan tempat bagi warga yang memiliki produk cemilan, cinderamata untuk dijajakan di Balkondes. Sehingga adanya fasilitas Balkondes memberi dampak bagi masyarakat disekitar.

Dari penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan bahwa faktor pendukung dari pengelolaan Balkondes ini antara lain adalah respon yang baik dari masyarakat dengan adanya program ini. Pengelola dan masyarakat bersinergi memajukan kawasan pariwisata Borobudur. Namun meskipun demikian, dalam penelitian ini masih ditemukan faktor penghambat yaitu belum adanya pemahaman yang baik terkait dengan kehadiran program ini sehingga pengelola yang berasal dari warga sekitar belum bisa memahami peluang yang dapat diambil dari kehadiran Balkondes. Sehingga peran masyarakat dalam pengelolaan Balkondes belum maksimal.

Kedua adalah penelitian dari I Made Cahya Baskara, Nazrina Zuryani, I G. P. B. Suka Arjawa berjudul *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Subak Sukawayah Ubud* menggali data dari potensi pariwisata yang ada di Subak Sukawayah yang diidentifikasi dari aspek alam, sosial, budaya dan buatan. Kemudian mengenai kesadaran masyarakat mengenai potensi pariwisata Subak Sukawayah. Hasil yang dipaparkan adalah pengembangan pariwisata saat ini tidak menimbulkan dampak ikutan terhadap kesiapan *karma* Subak secara kolektif sebagai pelaku usaha jasa dalam kegiatan pariwisata. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai kesempatan berusaha dengan adanya kegiatan pariwisata tersebut.

Potensi yang ada beberapa sudah dikembangkan menjadi restoran organi, kios *souvenir*, warung makanan dan minuman. Jenis aktivitas pariwisata dengan memanfaatkan jalur Subak Sukawayah yaitu *walking in the rice field* dan *cycling*. Sementara itu potensi lainnya seperti bidang sosial budaya belum mendapat perhatian untuk dikembangkan.

Mengenai partisipasi dalam pengelolaan Subak Sukawayah, peneliti membagi dalam empat tahapan yaitu partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengambilan manfaat dan evaluasi. Pertama adalah partisipasi dalam perencanaan ditemukan sebuah situasi pengelolaan, organisasi, teknis pembangunan akomodasi pariwisata, proteksi lahan, pengoptimalisasian peran pengurus dikatakan masih belum ideal. Disisi lain belum ada juga pendampingan dari pihak eksternal terkait dengan pengembangan Subak Sukawayah terutama untuk perencanaan pembangunan akomodasi dan mengidentifikasi daya tarik wisata. Kedua mengenai pelaksanaan pengembangan, dalam penelitian ini disebutkan tolak ukur partisipasi adalah sejauh mana masyarakat terlibat dalam aktivitas yang merupakan perwujudan program yang sudah direncanakan. Aktivitas yang ada dan melibatkan masyarakat ada seperti gotong-royong dan upacara di pura, serta menjaga irigasi subak. Meski demikian keterlibatan secara riil untuk bidang pariwisata masih sangat minim. Masih diperlukan strategi, kebijakan dan pembinaan agar subak dapat berkembang menjadi usaha pariwisata yang kondusif. Ketiga mengenai pengambilan manfaat. Pembangunan sarana pariwisata mengindikasikan suatu peluang usaha. Namun, *karma* subak belum mampu berpartisipasi aktif dalam memanfaatkannya menjadi peluang usaha besar. Keempat mengenai evaluasi. Terdapat dua poin yang cukup menjadi perhatian yang pertama akses jalan dan kedua mengenai tata letak bangunan. Mengenai akses jalan menjadi rusak karena adanya pembangunan akomodasi pariwisata. Kemudian mengenai tata letak bangunan adalah dengan didirikannya beberapa bangunan akomodasi pariwisata yang dibangun di areal persawahan subak mengganggu pertumbuhan tanaman padi.

Dari hal-hal tersebut kemudian disimpulkan bahwa potensi ataupun peluang yang ada di subak Sukawayah masih dapat diidentifikasi dan

dikembangkan. Kemudian untuk proses mengembangkan subak menjadi pariwisata yang besar harus melibatkan pula *karma* subak. Sehingga terjadi sinergi antara *karma* subak, pemerintah, dan yang akan mengelola. Diakhir juga untuk hambatan yang ada dari internal berupa *karma* subak yang masih belum dapat merespon perkembangan pariwisata dan masih lemah menegakkan peraturan persubakan. Faktor eksternal yang menghambat adalah belum adanya keterpaduan manajemen pengelolaan potensi karena masih didominasi investor dan peraturan penataan konservasi lingkungan fisik subak.

Ketiga yaitu penelitian dari Liya Ftianyani Tahun 2018 dengan judul *Analisis Partisipasi Pemuda Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Candirejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang* memaparkan mengenai partisipasi pemuda secara aktif dalam pengembangan desa wisata Candirejo dan juga mengenai faktor pendorong dan penghambat partisipasi pemuda.

Hasil penelitian ini memaparkan bentuk partisipasi aktif pemuda dalam membangun desa wisata Candirejo adalah pertama diskusi kelompok seperti *selapanan/* rapat 35 hari sekali yang membahas permasalahan yang terjadi ataupun keluhan-keluhan, kedua melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan kelompok seperti *saparan*, ketiga partisipasi dalam pengambilan keputusan, keempat memanfaatkan hasil pembangunan seperti lapangan yang tersedia di desa digunakan pemuda untuk transit delman saat menunggu penumpang.

Selain itu dalam penelitian ini memaparkan mengenai faktor pendorong dan penghambat tumbuh dan berkembangnya partisipasi. Pertama adalah kesempatan untuk berpartisipasi. Pemuda memiliki kesempatan berpartisipasi dan juga berkesempatan mengikuti kegiatan kelompok, diskusi, dan proses pengambilan keputusan dan memanfaatkan hasil pembangunan. Namun, masih ada hambatan yang dialami pemuda seperti lemahnya undang-undang atau peraturan pemerintah desa yang menjadi salah satu kendala dalam proses partisipasi pemuda. Kedua adalah kemampuan untuk berpartisipasi. Ketiga adalah kemauan untuk berpartisipasi.

Dari beberapa bentuk partisipasi pemuda di Desa Wisata Candirejo beserta dengan beberapa faktor pendukung dan penghambatnya, disimpulkan

bahwa partisipasi pemuda ditunjukkan dengan keaktifan pemuda dalam kegiatan kelompok sampai dengan pengambilan keputusan dan ikut memanfaatkan hasil pembangunan desa seperti fasilitas yang ada. Selain itu juga tumbuh dan berkembangnya partisipasi pemuda di desa didorong oleh tiga faktor, yaitu kesempatan, kemampuan dan kemauan untuk berpartisipasi dan ketiganya saling berkaitan. Namun, pada kesimpulan dikatakan juga bahwa faktor yang menghambat partisipasi adalah tidak maksimalnya pemuda dalam memanfaatkan kesempatan partisipasi dan juga kurangnya koordinasi antara pemerintah desa, kelompok masyarakat dan pemuda, serta pengaruh globalisasi.

Keempat adalah penelitian dari Wahyu Nurhidayah Tahun 2017 yang berjudul *Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pariwisata Di Desa Candirejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang*. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pariwisata di Desa Candirejo masuk dalam kategori baik. Selain itu kegiatan pariwisatanya beragam.

Partisipasi masyarakat dalam proses kegiatan pariwisata di Desa Candirejo masuk dalam kategori sedang mengikuti indikator yang telah dibuat oleh peneliti. Masyarakat peduli dalam pengembangan pariwisata, namun masih ditemukan partisipasi dari masyarakat yang belum optimal. Secara karakteristik jenis kelamin didominasi jenis kelamin laki-laki yang berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata.

Dari beberapa tinjauan pustaka di atas, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah fokus partisipasi, lokasi penelitian dan juga subyek yang diteliti. Fokus penelitian terdahulu adalah pada partisipasi untuk pengelolaan ataupun pengembangan potensi di wilayah tersebut. Sedangkan fokus dari penelitian ini adalah pada wujud, proses dan alasan partisipasi komunitas pada program BALKONDES Borobudur.

Dengan demikian, meskipun sudah ada penelitian dengan tema serupa yaitu mengenai partisipasi, namun antara penelitian terdahulu dan penelitian ini terdapat perbedaan. Selain itu dari sisi ruang lingkup juga berbeda,

meskipun ada satu tinjauan pustaka yang memiliki kesamaan lokasi. Sedangkan konsep yang mereka pakai pun tidak sesuai dengan apa yang penulis butuhkan dalam penyusunan kerangka berpikir pada proposal ini.

1.5. Kerangka Konsep

1. Partisipasi

Partisipasi merupakan suatu bagian penting dari pemberdayaan dan penumbuhan kesadaran. Semakin banyak orang yang menjadi peserta aktif, maka semakin ideal kepemilikan dan juga proses pemberdayaan masyarakat (Tesoriero, 2016). Partisipasi menurut FAO, 1989 (dalam Mikkelsen Britha, 2003, h.64) adalah ‘pemekaan’ (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan. Konteks mengambil definisi tersebut adalah karena bagi peneliti hal tersebut cukup sesuai dengan kondisi di BALKONDES Borobudur. BALKONDES sebagai suatu proyek pembangunan yang diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat untuk meningkatkan kemampuan.

Partisipasi menurut Paul (1987, dalam Kannan 2002) berpendapat bahwa dalam partisipasi harus mencakup kemampuan rakyat untuk mempengaruhi kegiatan-kegiatan sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan menurut Uphoff dan Cohen (dalam Tesoriero dan Ife, 2008, h. 296) menekankan pada rakyat memiliki peran dalam membuat keputusan.

Oaklet (dalam Tesoriero dan Ife, h. 295) partisipasi dikatakan sebagai alat dan juga tujuan, karena membentuk bagian dasar kultur yang membuka jalan bagi tercapainya Hak Asasi Manusia (HAM). Berikut merupakan perbandingan antara partisipasi sebagai cara dan sebagai tujuan:

PARTISIPASI SEBAGAI CARA	PARTISIPASI SEBAGAI TUJUAN
<ul style="list-style-type: none"> • Berimplikasi pada penggunaan partisipasi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah 	<ul style="list-style-type: none"> • Berupaya memberdayakan rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan mereka sendiri secara

ditetapkan sebelumnya.	lebih berarti.
<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan suatu upaya pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan program atau proyek. 	<ul style="list-style-type: none"> • Berupaya menjamin peningkatan peran rakyat dalam inisiatif-inisiatif pembangunan.
<ul style="list-style-type: none"> • Penekanan pada mencapai tujuan dan tidak terlalu pada aktivitas partisipasi itu sendiri. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus pada peningkatan kemampuan rakyat untuk berpartisipasi bukan sekedar mencapai tujuan-tujuan proyek yang sudah ditetapkan sebelumnya.
<ul style="list-style-type: none"> • Lebih umum dalam program-program pemerintah, yang pertimbangan utamanya adalah untuk menggerakkan masyarakat dan melibatkan mereka dalam meningkatkan efisiensi sistem penyampaian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pandangan ini relatif kurang disukai oleh badan-badan pemerintahan. Pada prinsipnya LSM setuju dengan pandangan ini.
<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi umumnya jangka pendek. 	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi dipandang sebagai sesuatu proses jangka panjang.
<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi sebagai cara merupakan bentuk pasif dari partisipasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi sebagai tujuan relatif lebih aktif dan dinamis.

Sumber: Oakley. 1991 (dalam Tesoriero dan Ife, 2008)

Berdasarkan beberapa definisi partisipasi di atas, disimpulkan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan individu ataupun kelompok dalam mencapai tujuan tertentu dan adanya pembagian wewenang dan tanggungjawab. Partisipasi yang dilakukan tentu terdiri dari bermacam hal. Bentuk Partisipasi menurut Effendi (Astuti, 2011) terbagi atas:

a. Partisipasi Vertikal

Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program

pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berbeda sebagai status bawahan, pengikut, atau klien.

b. Partisipasi Horizontal

Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.

Bentuk Partisipasi menurut Basrowi (Astuti, 2011) partisipasi masyarakat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Partisipasi Fisik

Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha sekolah.

b. Partisipasi Non Fisik

Partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

Dari teori di atas, akan digunakan peneliti untuk melihat wujud partisipasi dengan sedikit modifikasi untuk menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Modifikasi terutama pada poin partisipasi fisik dan non fisik. Pada teori ini sangat fokus dengan partisipasi dengan ruang lingkup sekolah ataupun dunia pendidikan. Namun, peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori dengan konteks partisipasi dalam komunitas.

Kondisi-kondisi yang mendorong partisipasi menurut Ife (2016: 310) dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Orang akan berpartisipasi apabila mereka merasa bahwa isu atau aktivitas tersebut penting
- (2) Orang harus merasa bahwa aksi mereka akan membuat perubahan
- (3) Berbagai bentuk partisipasi harus diakui dan dihargai
- (4) Orang harus bisa berpartisipasi, dan didukung dalam partisipasinya
- (5) Struktur dan proses tidak boleh mengucilkan

Teori di atas akan digunakan peneliti untuk melihat alasan komunitas yang akan diteliti berpartisipasi dalam BALKONDES Borobudur dengan mengambil beberapa poin saja yang dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan data di lapangan.

Indikator kuantitatif dari partisipasi menurut Ife (2016: 331) adalah

- (1) Perubahan-perubahan positif dalam layanan-layanan lokal
- (2) Jumlah pertemuan dan jumlah peserta Proporsi berbagai bagian dari kehidupan masyarakat
- (3) Jumlah orang yang dipengaruhi oleh isu yang diurus
- (4) Jumlah pemimpin lokal yang memegang peranan
- (5) Jumlah warga lokal yang memegang peranan dalam proyek
- (6) Jumlah warga lokal dalam berbagai aspek proyek dan pada waktu yang berbeda-beda

Indikator kualitatif dari partisipasi menurut Ife (2016: 332) adalah

- (1) Suatu kapasitas masyarakat yang tumbuh untuk mengorganisasi aksi/ kegiatan/pertemuan
- (2) Dukungan yang tumbuh dalam masyarakat dan jaringan yang bertambah kuat
- (3) Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hal-hal seperti keuangan dan manajemen proyek
- (4) Keinginan masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan keputusan
- (5) Peningkatan kemampuan dari mereka yang berpartisipasi dalam mengubah keputusan menjadi aksi
- (6) Meningkatnya jangkauan partisipan melebihi proyek untuk mewakilinya dalam organisasi-organisasi lain
- (7) Pemimpin-pemimpin yang muncul dari masyarakat
- (8) Meningkatnya jaringan dengan proyek-preoyek, masyarakat dan organisasi lainnya
- (9) Mulai memengaruhi kebijakan

Partisipasi yang terjadi di komunitas tentu terjadi melalui beberapa tahapan. Partisipasi terbagi menjadi empat tahap menurut Uphoff (Zulkifli, 2017) yaitu:

1. Tahap Perencanaan

Ditandai dengan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang merencanakan program pemberdayaan yang akan dilaksanakan di desa, serta menyusun rencana kerjanya.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahapan terpenting dalam pemberdayaan, sebab inti dari pemberdayaan adalah pelaksanaan. Wujud nyata partisipasi dalam tahapan ini dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk keterlibatan sebagai anggota proyek.

3. Tahap Menikmati Hasil

Tahapan ini dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subjek pemberdayaan, maka semakin besar manfaat program dirasakan, berarti program tersebut berhasil mengenai sasaran.

4. Tahap Evaluasi

Hal ini penting karena tahapan ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberikan masukan demi perbaikan pelaksanaan program selanjutnya.

Teori di atas akan membantu menjawab rumusan masalah ke tiga mengenai proses partisipasi.

Berdasarkan tulisan di atas, penulis mencoba untuk mengambil satu definisi dari FAO, 1989 (dalam Mikkelsen Britha, 2003, h.64). Di atas dipaparkan bahwa partisipasi adalah ‘pemekaan’ (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan. Hal ini dipilih penulis karena sangat sesuai dengan situasi di BALKONDES Borobudur. Maka, penulis mengambil definisi tersebut untuk digunakan dalam penelitian ini.

Penulis kemudian juga mengambil beberapa teori mengenai partisipasi yaitu bentuk partisipasi menurut Effendi, bentuk partisipasi

menurut Basrowi, kondisi-kondisi yang mendorong partisipasi menurut Ife dan tahapan partisipasi menurut Uphoff. Pemilihan ini dilakukan peneliti dalam rangka mendukung proses penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

Partisipasi di atas akan disandingkan dengan komunitas sebagai subyek penelitian. Maka selanjutnya penulis akan memaparkan mengenai komunitas untuk mengkerangkai pemahaman mengenai komunitas dalam penelitian ini.

2. Komunitas

Komunitas adalah *“a group of a people having in a contiguous geographic area, having common centers interests and activities, and functioning together in the chief concern of life”*. Dengan demikian suatu komunitas merupakan suatu kelompok sosial yang dapat dinyatakan sebagai “masyarakat setempat”, suatu kelompok yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu dengan batas-batas tertentu pula, dimana kelompok itu dapat memenuhi kebutuhan hidup dan dilingkupi oleh perasaan kelompok serta interaksi yang lebih besar di antara para anggotanya (Loren O. Osborn dan Martin H. Neumeyer, 1984).

Definisi lain mengatakan bahwa komunitas adalah sebuah kelompok sosial yang terdiri dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Komunitas memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa (Wenger, 2002).

Definisi komunitas menurut Bell & Newby (1971) (dalam Ife, 2016) sebagai suatu bentuk organisasi sosial dengan lima ciri sebagai berikut:

(1) Skala manusia

Skala manusia terbatas pada orang yang akan saling mengenal atau dapat dengan mudah untuk saling berkenalan apabila diperlukan, dan di mana interaksi-interaksi sedemikian rupa sehingga mudah diakses oleh semua.

(2) Identitas dan kepemilikan

Komunitas lebih dari sekedar suatu kelompok yang dibentuk untuk kemudahan administratif, tetapi memiliki beberapa ciri dari sebuah perkumpulan atau perhimpunan, ke dalam mana orang termasuk sebagai anggotadan di mana perasaan memiliki ini pending dan dengan jelas diakui.

(3) Kewajiban-kewajiban

Kelompok membutuhkan pemeliharaan jika ingin tetap hidup, dan tanggung jawab fungsi-fungsi pemeliharaan dari suatu komunitas terletak sebagian besar pada para anggotanya. Oleh karena itu, menjadi seorang anggota dari sebuah komunitas seharusnya tidak menjadi pengalaman yang murni pasif, tetapi seharusnya juga melibatkan sesuatu partisipasi aktif.

(4) *Gemeinschaft*

Gemeinschaft terkandung dalam konsep komunitas, sebagai lawan dari struktur dan hubungan *Gesellschaft* dari masyarakat massa. Jadi, sebuah komunitas akan memungkinkan orang berinteraksi dengan sesamanya dalam keragaman peran yang lebih besar, yang peran-peran tersebut kurang dibeda-bedakan dan bukan berdasarkan kontrak, dan yang akan mendorong interksi-interaksi dengan yang lain sebagai 'seluruh warga' ketimbang sebagai peran atau kategori yang terbatas dan tetap. Hal ini memungkinkan individu untuk menyumbangkan berbagai bakat dan kemampuan untuk keuntungan yang lain dan komunitas tersebut sebagai suatu keseluruhan.

(5) Kebudayaan

Suatu komunitas memungkinkan pemberian nilai, produksi dan ekspresi dari suatu kebudayaan lokal atau berbasis masyarakat, yang akan mempunyai ciri-ciri unik yang berkaitan dengan komunitas yang bersangkutan yang akan memungkinkan orang untuk menjadi produser aktif dari kultur tersebut ketimbang konsumen yang pasif, dan yang akan kemudian mendorong baik keanekaragaman di antara komunitas maupun partisipasi yang berbasis lebar.

Menurut Crow dan Allan, Komunitas dapat terbagi menjadi 2 komponen yaitu:

1. Berdasarkan lokasi atau tempat wilayah atau tempat sebuah komunitas dapat dilihat sebagai tempat dimana sekumpulan orang mempunyai sesuatu yang sama secara geografis.
2. Berdasarkan minat sekelompok orang yang mendirikan suatu komunitas karena mempunyai ketertarikan dan minat yang sama, misalnya agama, pekerjaan, suku, ras, maupun berdasarkan kelainan seksual.

Proses pembentukan komunitas ini sifatnya adalah horisontal. Hal ini dikarenakan prosesnya dilakukan oleh individu-individu secara setara. Komunitas sebagai sebuah identifikasi dan interaksi sosial yang dibangun dengan berbagai dimensi kebutuhan fungsional (Soenarno, 2002).

Berdasarkan pemaparan di atas dari beberapa sumber, penulis kemudian mengambil sebuah pemaknaan mengenai komunitas sebagai “masyarakat setempat” dengan batasan-batasannya seperti yang ditulis oleh Loren O. dkk mengenai komunitas. Penulis juga sepakat atas pemaknaan komunitas yang terbagi menjadi 2 komponen menurut Crow dan Alan yaitu lokasi atau tempat wilayah dan minat sekelompok orang yang mendirikan. Hal ini dikarenakan definisi dan pemaknaan terhadap komunitas dirasa sesuai dengan situasi di lapangan ketika penulis mengadakan observasi lapangan.

3. Partisipasi Komunitas

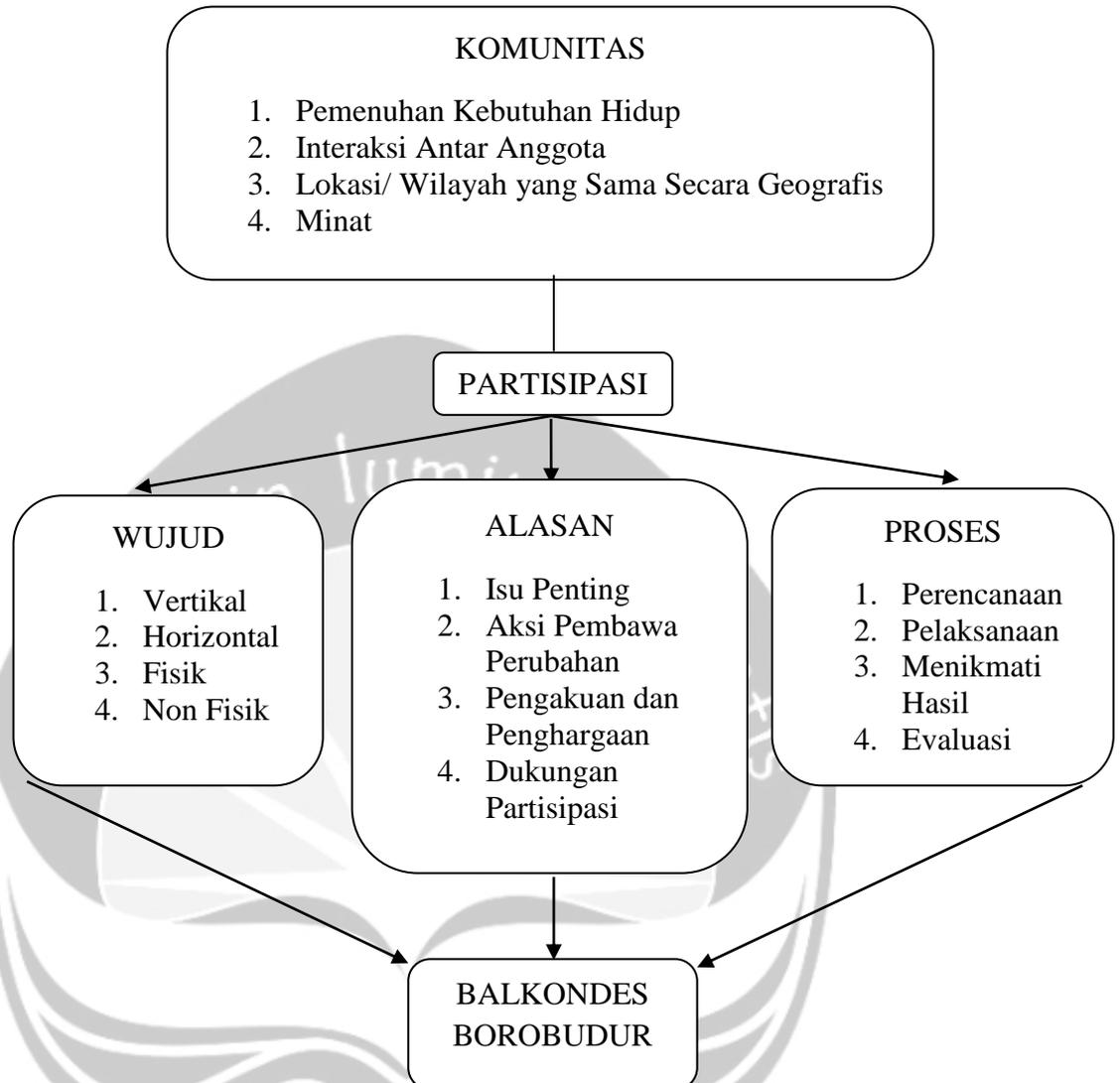
Penulis mencoba mengambil pemaknaan dari Partisipasi Komunitas yang diambil dari pemaparan di atas mengenai partisipasi dan juga mengenai komunitas untuk melakukan penelitian ini. Penulis memaknai partisipasi komunitas sebagai ‘pemekaan’ (membuat peka) masyarakat disuatu wilayah dengan batas tertentu untuk mau meningkatkan kemauan dan kemampuan dalam menanggapi atau

merespon proyek pembangunan yang ada dilingkupi oleh perasaan kelompok serta interaksi yang lebih besar di antara para anggotanya.

Pemaknaan tersebut berasal dari penggabungan antara definisi partisipasi yang penulis ambil dari FAO, 1989 dalam Mikkelsen Britha, 2003 dan juga definisi komunitas dari Loren O. Osborn & Martin H. Nuemeyer, 1984. Dari situlah penulis mencoba menggabungkan dan kemudian mencoba memaknai partisipasi komunitas. Penulis memilih definisi tersebut karena dirasa cukup dapat menggambarkan situasi di lokasi penelitian.

Kondisi di lokasi penelitian yaitu di BALKONDES Borobudur yang merupakan sebuah proyek program dari PT. TWC yang harapannya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar Borobudur dengan cara melibatkan masyarakat dalam proses kegiatannya. Maka dengan situasi itu, penulis merasa memaknai suatu partisipasi komunitas seperti yang sudah ditulis di atas sangat relevan dengan kondisi lapangan.

4. Kerangka Berpikir



1.6. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2010).

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Tujuan dipilihnya metode ini adalah untuk mendapatkan data yang mendalam mengenai partisipasi komunitas Ngaran pada Balcodes

Borobudur. Level analisis dari penelitian ini pada tataran komunitas. Jadi pemahaman yang dibangun adalah partisipasi yang dilakukan oleh komunitas. Komunitas diposisikan sebagai subyek atau pelaku partisipasi.

3. Subyek Penelitian

Penelitian mengambil subyek penelitian yang dimulai dari Pak Agus sebagai pengelola Balkondes Borobudur. Nama ini muncul dari rekomendasi pihak PKBL PT. TWC. Selanjutnya subyek penelitian yang menjadi narasumber adalah Mas Hani (superisor warung kopi), Mbak Lia (*homestay*), Pak Subandi (wakil ketua *art shop*), Mas Ady (ketua karang taruna dan ketua Jejeg Art), Pak Kirno (penggagas Andong Tilik Ndeso).

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data *snowball*. Teknik *sampling snowball* adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Peneliti menyajikan suatu jaringan melalui gambar *sociogram* berupa gambar lingkaran-lingkaran yang dikaitkan atau dihubungkan dengan garis-garis. Setiap lingkaran mewakili satu responden atau kasus, dan garis-garis menunjukkan hubungan antar responden atau antar kasus (Neuman, 2003).

Pada saat di lapangan, dilakukan dulu observasi untuk memastikan lagi bahwa lokasi tersebut dapat diteliti serta ada narasumber yang dapat membantu memberikan informasi dari penelitian yang akan dilaksanakan. Setelah itu dilakukan wawancara dengan narasumber pertama, dan berlanjut dengan teknik *snowball* hingga data kemudian jenuh dan wawancara dihentikan. Selanjutnya data pendukung yang digunakan adalah hasil dari observasi selama berada di lapangan untuk memperkuat data dari hasil wawancara.

5. Analisis Data (triangulasi untuk akurasi, ada data wawancara, observasi, foto, dll)

Teknik analisis data dibutuhkan sebagai sarana menarik sebuah kesimpulan dari data yang sudah dikumpulkan. Pada penulisan ini digunakan teknik triangulasi untuk lebih menjamin akurasi data yang didapatkan. Triangulasi dilakukan dari hasil temuan wawancara, observasi, serta bukti foto dan bagan yang kemudian didialogkan.

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terdiri secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi sebagai sesuatu yang saling menjalin merupakan proses siklus interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis” (Ulber Silalahi, 2009: 339). Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing teknik:

5.1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai sebuah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proyek kualitatif berlangsung, atau selama proses pengumpulan data masih dilakukan.

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Proses reduksi data berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Proses ini juga menggunakan triangulasi data untuk menarik sebuah data yang valid dalam penulisan ini, untuk menjamin akurasi data dari penulisan ini.

5.2. Penyajian data

Penyajian data merupakan kegiatan penting kedua dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan

informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Ulber Silalahi, 2009: 340). Penyajian data dalam kualitatif sekarang ini juga dapat dilakukan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Penulisan ini juga memaparkan mengenai data foto serta bagan, selain dari hasil wawancara dan observasi. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu padan dan mudah diraih. Jadi, penyajian data merupakan bagian dari analisis.

5.3. Penarikan kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan/verifikasi. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal. Namun dalam penulisan ini kesimpulan juga didialogkan dengan penelitian sebelumnya untuk dapat melakukan *positioning* penulisan ini dihadapan penulisan yang sudah ada sebelumnya, serta mengetahui sumbangan yang diberikan dari hasil penulisan ini.